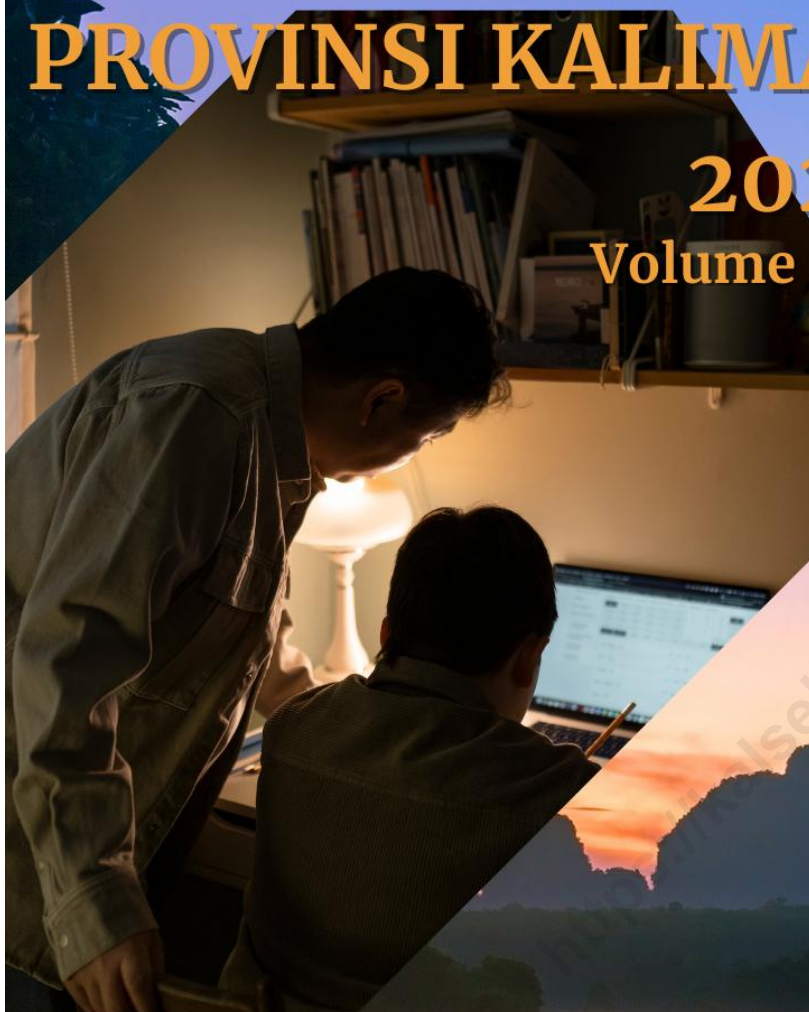


Katalog: 4102002.63

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

2024
Volume 5, 2025



tsel.bps.go.id



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Katalog: 4102002.63

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

2024
Volume 5, 2025

<https://kalsel.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2024

Volume 5, 2025

Katalog : 4102002.63
Nomor Publikasi : 63000.25015

Ukuran Buku : B5 ISO (17,6 x 25,0 cm)
Jumlah Halaman : ix + 47

Penyusun Naskah:
BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Penyunting:
BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Pembuat Kover:
BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Penerbit:
©Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan

Sumber Ilustrasi:
BPS Provinsi Kalimantan Selatan (Kover Depan) dan Canva
(Kover Belakang, Canva)

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan.

TIM PENYUSUN

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

2024

Volume 5, 2025

Pengarah:

Mukhamad Mukhanif

Penanggung Jawab:

Ahmadi Murjani

Penyunting:

Fitri Handayani

Rizki Safarida

Alvi Nur Laily

Pengolah Data dan Penulis Naskah:

Zaky Musyarof

Nurliana

Ahmadi Murjani

Penata Letak:

Nanda Prasetya Pamungkas

Pembuat Kover:

Nanda Prasetya Pamungkas

KATA PENGANTAR

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu indikator strategis pembangunan. Indikator ini digunakan untuk memantau capaian pembangunan manusia di suatu daerah. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan manusia dapat tercermin dari indikator IPM.

Publikasi Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Selatan 2024 diharapkan dapat membantu melihat situasi pembangunan manusia secara sederhana dengan bahasa yang luwes dan populer agar dapat dipahami dengan mudah oleh seluruh khalayak. Publikasi ini memuat pembahasan capaian IPM menurut komponen pembentuknya beserta berbagai data pendukung. Publikasi ini juga menyajikan beberapa analisis tematik yang berkenaan dengan indikator IPM.

Akhir kata, kami mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap pihak yang telah berkontribusi pada penyusunan publikasi ini. Semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan. Kami mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaan publikasi pada tahun-tahun berikutnya.

Banjarbaru, Mei 2025

Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Kalimantan Selatan



Mukhamad Mukhanif

DAFTAR ISI

Volume 5, 2025

| | Halaman |
|--|----------------|
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR TABEL | ix |
| DAFTAR GAMBAR | ix |
| | |
| I PEMBANGUNAN MANUSIA SEUTUHNYA | 1 |
| 1.1 Konsep Pembangunan Manusia | 1 |
| 1.2 Sejarah Indeks Pembangunan Manusia | 2 |
| 1.3 Teknik Perhitungan IPM di Indonesia..... | 3 |
| | |
| II CAPAIAN IPM KALIMANTAN SELATAN | 12 |
| 2.1 Konsep Pembangunan Manusia | 13 |
| 2.2 Capaian pada Dimensi Kesehatan | 15 |
| 2.3 Capaian pada Dimensi Pendidikan | 18 |
| 2.4 Capaian pada Dimensi Ekonomi | 21 |
| | |
| III CAPAIAN IPM KABUPATEN/KOTA | 25 |
| 3.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan | 25 |
| 3.2 Ketimpangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan..... | 31 |
| | |
| IV ANALISIS KORELASI MIGRASI RISEN TERHADAP RATA-RATA LAMA SEKOLAH DI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2024: APAKAH TERJADI BRAIN-GAIN? ... | 35 |
| 4.1 Pengantar Teori <i>Brain-Gain</i> dari Proses Migrasi | 35 |
| 4.2 Hubungan Migran Risen dengan Komponen IPM Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) | 37 |
| 4.3 Gambaran Migran Risen di Kalimantan Selatan Tahun 2024 | 38 |
| 4.4 Keterkaitan antara Migran Risen dan Peningkatan RLS di Kalimantan Selatan Tahun 2024 | 41 |
| 4.5 Kesimpulan..... | 44 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | 47 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------------|---|----|
| Tabel 1.1 | Nilai Maksimum dan Nilai Minimum Indikator Komponen IPM..... | 10 |
| Tabel 3.1 | Ukuran Disparitas IPM dan Indikator Pembentuk IPM antar Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan, 2020 - 2024 | 32 |
| Tabel 4.1 | Matriks Korelasi Share Migran Risen dengan RLS Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, 2024 | 43 |

<https://kalsel.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|-------------------|---|----|
| Gambar 2.1 | Perkembangan IPM Indonesia dan Provinsi Kalimantan Selatan, 2020-2024 (menggunakan UHH hasil SP2020 LF) | 14 |
| Gambar 2.2 | Umur Harapan Hidup Hasil Long Form SP2020 Indonesia dan Kalimantan Selatan, 2020-2024 (tahun) | 16 |
| Gambar 2.3 | Harapan Lama Sekolah Indonesia dan Provinsi Kalimantan Selatan, 2020 - 2024 (tahun) | 19 |
| Gambar 2.4 | Rata-Rata Lama Sekolah Indonesia dan Provinsi Kalimantan Selatan, 2020 - 2024 (tahun) | 20 |
| Gambar 2.5 | Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Indonesia dan Provinsi Kalimantan Selatan, 2020 – 2024 (ribu rupiah/orang/tahun) | 22 |
| Gambar 3.1 | IPM Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan, 2023-2024 | 26 |
| Gambar 3.2 | Umur Harapan Hidup Provinsi/Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan, 2024 (Tahun) | 27 |
| Gambar 3.3 | Harapan Lama Sekolah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan, 2024 (Tahun) | 29 |
| Gambar 3.4 | Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan, 2024 (Tahun) | 30 |
| Gambar 3.5 | Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan, 2024 (Ribu Rupiah) | 31 |
| Gambar 4.1 | Proporsi Migran Risen per Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, 2024 (%) | 39 |
| Gambar 4.2 | Proporsi Arus Perpindahan Migran Risen per Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, 2019 - 2024 (%) | 40 |
| Gambar 4.3 | Scatter Plot Share Migran Risen (%) dan Nilai RLS (Tahun) Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, 2024 | 42 |

BAB I

PEMBANGUNAN MANUSIA SEUTUHNYA

1.1 Konsep Pembangunan Manusia

Pemahaman tentang pembangunan manusia berbeda dengan pandangan klasik tentang pembangunan. Pandangan klasik lebih fokus pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita, dengan menekankan perdagangan, investasi, dan kemajuan teknologi sebagai aspek kunci. Manusia sering kali dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi, bukan sebagai fokus utama pembangunan itu sendiri. Konsep ini melihat manusia lebih sebagai penerima manfaat dari pembangunan daripada sebagai agen yang aktif dalam mengubah proses pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Konsep pembangunan manusia mempunyai cakupan yang lebih luas dari teori konvensional pembangunan ekonomi. Pendekatan pembangunan manusia menggabungkan aspek produksi (sebagai alat, bukan tujuan akhir) dan distribusi komoditas, serta peningkatan dan pemanfaatan kemampuan manusia. Pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan sektor sosial, tapi merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua sektor, mulai dari politik, kebebasan ekonomi, dan sosial sehingga memiliki peluang untuk menjadi kreatif dan produktif dan menikmati harga diri pribadi dan jaminan hak asasi manusia. Dengan demikian, pembangunan manusia adalah proses perluasan pilihan masyarakat.

Dari banyaknya pilihan manusia yang berubah setiap saat tersebut, ada tiga pilihan yang sangat mendasar, yaitu untuk berumur panjang dan hidup sehat; untuk memperoleh pendidikan; dan untuk memiliki akses terhadap sumber-sumber kebutuhan agar hidup secara layak. Apabila ketiga hal mendasar tersebut tidak dimiliki, maka pilihan lain tidak dapat diakses.

Ketiga hal dasar ini menjadi acuan dalam melihat sejauh mana pembangunan manusia telah dicapai. Para ahli kemudian mengembangkan

sebuah konsep pengukuran yang disebut dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ke dalam bentuk ukuran kuantitatif agar dapat diukur dan diperbandingkan secara standar antar wilayah dan antar waktu.

1.2 Sejarah Indeks Pembangunan Manusia

Perjalanan penghitungan IPM dimulai pada tahun 1990. Pada tahun tersebut *United Nations Development Programme* (UNDP) memperkenalkan sebuah gagasan baru dalam pengukuran pembangunan manusia yang disebut dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM diperkenalkan sebagai sebuah ukuran yang digunakan untuk melihat capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup:

1. Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*)
2. Pengetahuan (*knowledge*); dan
3. Standar hidup layak (*decent standard of living*).

Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Pada awal laporan, UNDP mengukur dimensi kesehatan dengan menggunakan angka harapan hidup waktu lahir, dimensi pengetahuan dengan menggunakan angka melek huruf, dan dimensi standar hidup layak dengan menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Untuk menghitung ketiga dimensi menjadi sebuah indeks komposit IPM digunakan rata-rata aritmatik.

Dalam perkembangannya tercatat UNDP telah melakukan dua kali penyempurnaan terkait indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM,

yaitu pada tahun 1991 dan 1995, kemudian dilakukan perubahan metode penghitungan pada tahun 2010.

Tahun 1991 UNDP melakukan penyempurnaan penghitungan IPM dengan menambahkan variabel rata-rata lama sekolah ke dalam dimensi pengetahuan, sehingga terdapat dua indikator dalam dimensi pengetahuan, yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. UNDP memberi bobot yang berbeda untuk kedua indikator tersebut, indikator angka melek huruf diberi bobot dua per tiga, sementara indikator rata-rata lama sekolah diberi bobot sepertiga. Keempat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM masih cukup relevan hingga 1994. Namun pada tahun 1995 UNDP kembali melakukan penyempurnaan metode penghitungan IPM, yaitu mengganti variabel rata-rata lama sekolah menjadi gabungan angka partisipasi kasar. Pembobotan tetap dilakukan dengan metode yang sama seperti sebelumnya.

Indeks Pembangunan Manusia sebagai salah satu indikator yang penting dalam melihat sisi lain dari pembangunan mempunyai manfaat penting, antara lain adalah sebagai berikut:

- untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia.
- dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.

Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

1.3 Teknik Perhitungan IPM di Indonesia

Pada tahun 2014, Indonesia secara resmi melakukan penghitungan IPM dengan metode baru. Sumber data yang tersedia di Indonesia untuk menghitung IPM antara lain:

- Sensus Penduduk atau Proyeksi Penduduk untuk Angka Harapan Hidup

(AHH)

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) untuk menghitung Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) serta standar hidup layak
- PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota sehingga diproksi dengan pengeluaran per kapita disesuaikan menggunakan Susenas.

Indonesia melakukan beberapa penyesuaian terhadap metode baru. Dari keempat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM metode baru, tiga diantaranya sama dengan UNDP. Khusus untuk PNB per kapita, karena masalah ketersediaan data, indikator ini diproksi dengan pengeluaran per kapita.

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, IPM merupakan ukuran kualitas hidup yang dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan; dan kehidupan yang layak. Untuk mengukur dimensi kesehatan digunakan UHH, selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli. Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

1. Umur Panjang dan Hidup Sehat

Pembangunan manusia harus lebih mengupayakan agar penduduk dapat mencapai “umur” yang panjang dan hidup sehat. Sebenarnya banyak indikator yang dapat digunakan untuk mengukur dimensi ini tetapi dengan mempertimbangkan ketersediaan data secara global, UNDP memilih indikator umur harapan hidup saat lahir (*life expectancy at birth*) yang biasa dinotasikan

dengan e^o . Umur harapan Hidup dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program *Micro Computer Program for Demographic Analysis* (MCPDA) atau Mortpack. Angka kematian bayi (IMR) tidak digunakan untuk keperluan itu karena indikator itu dinilai tidak peka bagi negara-negara industri yang telah maju. Seperti halnya IMR, e^o sebenarnya merefleksikan keseluruhan tingkat pembangunan dan bukan hanya bidang kesehatan. Di Indonesia e^o dihitung dengan metode tidak langsung. Metode ini menggunakan dua macam data dasar, yaitu rata-rata anak yang dilahirkan hidup dan rata-rata anak yang masih hidup. Prosedur penghitungan e^o yang diperoleh dengan metode tidak langsung merujuk pada keadaan 3-4 tahun dari tahun survei. Dari dimensi umur panjang dan hidup sehat ini akan diperoleh indeks kesehatan.

Sumber data dasar yang digunakan untuk penghitungan UHH berasal dari data Sensus Penduduk (SP). Hingga tahun 2022 UHH IPM dihitung berdasarkan data dasar SP2010. Mulai tahun 2023, BPS melakukan *updating* sumber data UHH dengan hasil *Long Form* SP2020 yang lebih terkini. Sumber data terbaru ini digunakan untuk menghitung UHH mulai tahun data 2020.

2. Pengetahuan

Selain umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan juga diakui secara luas sebagai unsur mendasar dari pembangunan manusia. Dengan pertimbangan ketersediaan data, pengetahuan diukur dengan dua indikator, yaitu angka rata-rata lama sekolah/ RLS (*Mean Years of Schooling-MYS*) dan angka harapan lama sekolah/ HLS (*Expected Years of Schooling-EYS*). Sumber data yang digunakan untuk penghitungan RLS dan HLS berasal dari data Susenas, BPS. RLS dihitung dengan mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP.

RLS dihitung untuk penduduk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Sementara Harapan Lama Sekolah (HLS), sebagai pengganti indikator Angka Melek Huruf, dihitung

pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Asumsi yang digunakan adalah kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Kemudian untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren. Sumber data pesantren berasal dari Direktorat Pendidikan Islam, Kementerian Agama.

Harapan lama Sekolah (HLS), dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Keterangan:

HLS_a^t : Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t

E_i^t : Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t

P_i^t : Jumlah penduduk usia i pada tahun t

i : Usia (a, a+1, ..., n)

FK : Faktor koreksi pesantren

Faktor koreksi pesantren dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$FK = \frac{\text{Jumlah santri sekolah dan mukim}}{\text{Jumlah penduduk umur 7 tahun ke atas}} + 1$$

Keterangan :

- Jumlah santri sekolah dan mukim = rasio santri mukim dikalikan dengan jumlah santri sekolah
- Rasio santri mukim = jumlah santri bermukim dibagi dengan jumlah santri seluruhnya

Dari dimensi pengetahuan ini akan diperoleh indeks pendidikan.

3. Standar Hidup Layak

Selain umur panjang dan hidup sehat dan pengetahuan, unsur dasar pembangunan manusia yang diakui secara luas adalah standar hidup layak.

Banyak indikator alternatif yang dapat digunakan untuk mengukur unsur ini. Dengan mempertimbangkan ketersediaan data secara internasional, UNDP memilih PNB (Produk Nasional Bruto) per kapita. Data PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga diproksi dengan pengeluaran per kapita disesuaikan dengan menggunakan data Susenas, BPS. Penentuan nilai maksimum dan nilai minimum menggunakan standar UNDP untuk keterbandingan global, kecuali standar hidup layak karena menggunakan ukuran rupiah.

Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kabupaten/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100 agar dibandingkan perkembangannya antar waktu.

Untuk menghitung pengeluaran per kapita yang disesuaikan pertama dihitung terlebih dahulu paritas daya beli untuk tiap unit barang atau *Purchasing Power Parity* (PPP/unit). Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas, dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan. Metode penghitungan paritas daya beli menggunakan Metode Rao.

Penghitungan Paritas Daya Beli (PPP) dilakukan sesuai rumus:

$$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{P_{ij}}{P_{ik}} \right)^{1/m}$$

Keterangan:

P_{ik} : harga komoditas i di Jakarta Selatan

P_{ij} : harga komoditas i di kab/kota j

m : jumlah komoditas

Rata-rata pengeluaran per kapita konstan kemudian disesuaikan dengan cara dibagi dengan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity*- PPP).

Pengeluaran yang telah dibagi dengan PPP ini disebut dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

$$Y_t^{**} = \frac{Y_t^*}{\text{Paritas Daya Beli}}$$

dengan :

Y_t^{**} : Rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan

Y_t^* : Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun atas dasar harga konstan 2012

Beberapa tahapan dalam penghitungan IPM dapat dijelaskan sebagai berikut :

- **Tahap pertama** penghitungan IPM adalah menghitung indeks masing-masing komponen IPM (indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks pengeluaran)

Dimensi kesehatan

$$I_{\text{kesehatan}} = \frac{UHH - UHH_{\min}}{UHH_{\text{maks}} - UHH_{\min}}$$

Dimana:

UHH = Umur Harapan Hidup saat lahir

UHH_{maks} = Nilai maksimum UHH

UHH_{\min} = Nilai minimum UHH

Dimensi Pendidikan

$$I_{\text{pengetahuan}} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

Keterangan : HLS dan RLS dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

Dimana :

I_{HLS} = Indeks Harapan Lama Sekolah

HLS = Harapan Lama Sekolah

HLS_{maks} = Nilai maksimum Harapan Lama Sekolah

HLS_{min} = Nilai minimum Harapan Lama Sekolah

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

Dimana:

I_{RLS} = Indeks Rata-rata Lama Sekolah

RLS = Rata-rata Lama Sekolah

RLS_{maks} = Nilai maksimum Rata-rata Lama Sekolah

RLS_{min} = Nilai minimum Rata-rata Lama Sekolah

Dimensi Standar Hidup Layak (pengeluaran)

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$$

Keterangan:

- Indeks pendapatan diproksi dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan
- ln adalah logaritma natural

- **Tahap kedua**, menghitung rata-rata geometrik dari Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan, dan Indeks Pengeluaran dengan rumus:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{AHH} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$$

Penentuan nilai maksimum dan minimum dari seluruh dimensi pembentuk IPM menggunakan standar UNDP untuk keterbandingan global, kecuali standar hidup layak karena menggunakan ukuran rupiah seperti yang terangkum dalam tabel berikut.

Tabel 1.1 Nilai Maksimum dan Nilai Minimum Indikator Komponen IPM

| Indikator | Satuan | Minimum | | Maksimum | |
|------------------------------------|--------|---------------|------------------|-------------------|--------------------|
| | | UNDP | BPS | UNDP | BPS |
| Angka Harapan Hidup | Tahun | 20 | 20 | 85 | 85 |
| Expected Years of Schooling | Tahun | 0 | 0 | 18 | 18 |
| Mean Years of Schooling | Tahun | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Pengeluaran per Kapita Disesuaikan | | 100 (PPP USD) | 1.007.436* (IDR) | 107.721 (PPP USD) | 26.572.352** (IDR) |

Catatan :

* Daya beli minimum berasal dari garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua

**Daya beli maksimum berasal dari nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025.

Sumber : Measuring The real Size of The World Economy, The World Bank dan BPS

- **Tahap ketiga** adalah menghitung kecepatan IPM, yang digunakan untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu tertentu. Kecepatan IPM dihitung diukur dengan ukuran pertumbuhan IPM per tahun

$$Pertumbuhan\ IPM = \frac{IPM_t - IPM_{t-1}}{IPM_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

IPM_t : IPM suatu wilayah pada tahun t

IPM_{t-1} : IPM suatu wilayah pada tahun t-1

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu juga dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok, yaitu:

1. Kelompok “sangat tinggi” : $IPM \geq 80$
2. Kelompok “tinggi” : $70 \leq IPM < 80$
3. Kelompok “sedang” : $60 \leq IPM < 70$
4. Kelompok “rendah” : $IPM < 60$

<https://kalsel.bps.go.id>

BAB II

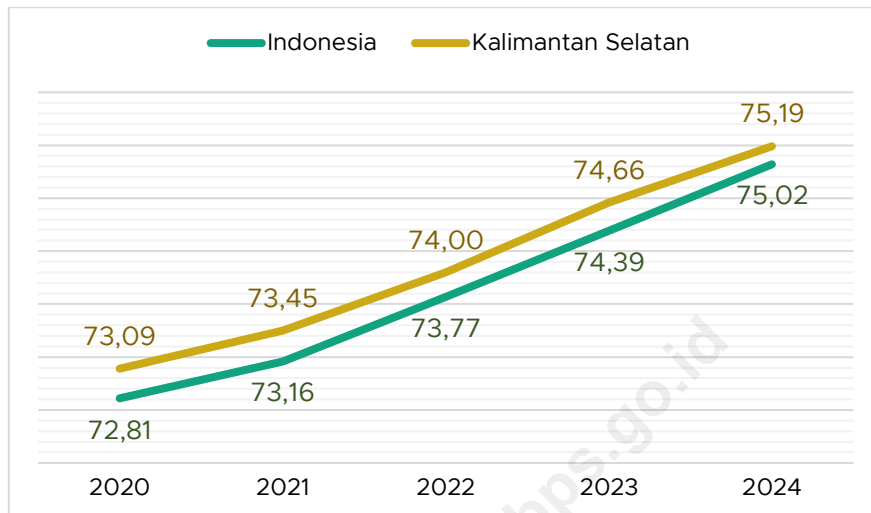
CAPAIAN IPM KALIMANTAN SELATAN

2.1 Konsep Pembangunan Manusia

Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini tampaknya merupakan suatu kenyataan yang sederhana. Tetapi hal ini sering kali terlupakan oleh berbagai kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang (UNDP, 1990). Definisi ini sesungguhnya memberikan makna bahwa pembangunan yang dimaksud merujuk pada pembangunan manusia. Sementara peningkatan kualitas hidup adalah kunci utama konsep pembangunan manusia yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan alat dari pembangunan manusia. Ini artinya kualitas penduduk menjadi bagian penting dalam monitoring pembangunan. Negara yang berhasil dalam pembangunan manusianya sama artinya dengan berhasil dalam pembangunan dalam arti sesungguhnya.

Dalam konsep pembangunan manusia juga menempatkan manusia sebagai kekayaan yang sesungguhnya bagi sebuah negara. Hal ini sejalan dengan pembukaan pada buku *Human Development Report* (HDR) edisi pertama yang dipublikasikan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990. Di dalamnya ditekankan arti penting pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development*) yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir, dan bukan sebagai alat pembangunan. Pembangunan manusia berarti pertumbuhan yang positif dan perubahan dalam tingkat kesejahteraan. Hal ini harus terjadi pada semua aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan. Oleh karena itu, fokus utama pembangunan manusia adalah pada manusia dan kesejahteraannya.

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, pembangunan manusia di negara manapun termasuk di Indonesia diamati perkembangannya dengan angka yang terukur. Angka ini dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dapat merepresentasikan sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan.



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (diolah)

Gambar 2.1 Perkembangan IPM Indonesia dan Provinsi Kalimantan Selatan, 2020 - 2024 (menggunakan UHH hasil SP2020 LF)

Pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Selatan terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya nilai Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Selatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, IPM Kalimantan Selatan terus meningkat hingga mencapai 75,19. Angka ini meningkat sebesar 0,53 poin atau tumbuh sebesar 0,71 persen dibandingkan dengan tahun 2023. Pertumbuhan ini melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh hingga 0,89 persen.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, IPM Kalimantan Selatan selalu berada di atas angka IPM nasional. Tahun 2024, IPM Indonesia berada pada level 75,02. Dilihat lebih dalam dari sisi dimensi pembentuk, dimensi penyusun IPM yang berada di atas rata-rata nasional adalah dimensi kesehatan dan ekonomi. Sementara dimensi pendidikan masih di bawah rata-rata nasional. Dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia, capaian IPM

Kalimantan Selatan berada pada posisi ke-13. Sementara jika dibandingkan dengan lima provinsi di regional Pulau Kalimantan, capaian IPM Kalimantan Selatan berada di posisi kedua setelah Kalimantan Timur. Capaian ini terus dipertahankan sejak tahun 2020.

IPM Kalimantan Selatan dan Indonesia sudah berada pada klasifikasi yang sama, yakni IPM Tinggi, karena sudah mencapai 70 ke atas. Capaian klasifikasi IPM yang tinggi ini sudah diperoleh Kalimantan Selatan sejak 2018. Prestasi ini merupakan kemajuan signifikan dalam upaya pembangunan manusia di Kalimantan Selatan. Peningkatan ini didorong oleh meningkatnya komponen penyusun IPM, umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita disesuaikan.

2.2 Capaian pada Dimensi Kesehatan

Kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan dapat dipandang dari aspek fisik dan non fisik yang tentunya saling berkaitan. Kualitas fisik penduduk dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Salah satu indikator utama dalam mengukur derajat kesehatan penduduk secara makro adalah umur harapan hidup saat lahir¹ (UHH). UHH menunjukkan tingkat kualitas kesehatan suatu masyarakat. Indikator ini dapat dipandang sebagai suatu bentuk akhir dari hasil upaya peningkatan taraf kesehatan secara makro.

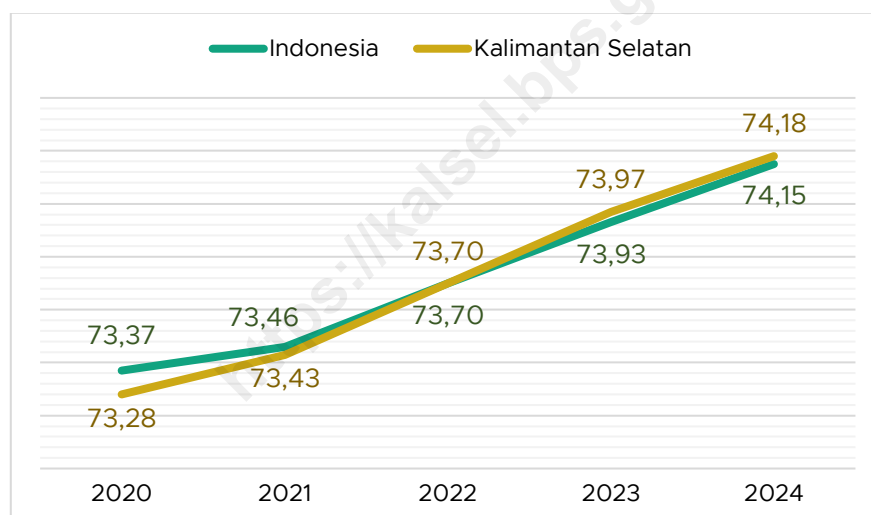
UHH didefinisikan sebagai rata-rata peluang tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Meningkat atau menurunnya UHH tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi. UHH dihitung menggunakan pendekatan tak langsung (*indirect estimation*) dengan memasukkan indikator anak lahir hidup (ALH) dan anak masih hidup (AMH) dalam metode perhitungannya. Pada penghitungan IPM, UHH kemudian ditransformasi menjadi indeks harapan hidup melalui proses normalisasi berdasarkan nilai maksimum dan minimum harapan hidup sesuai standar UNDP. Berdasarkan penghitungan UNDP, batas atas harapan hidup tertinggi

¹ sebelum tahun 2019, Indonesia masih menggunakan istilah angka harapan hidup saat lahir sebagai terjemahan/padanan kata dari *life expectancy at birth*.

adalah selama 85 tahun dan batas bawah harapan hidup tertinggi adalah 25 tahun.

Pada tahun 2024, UHH Kalimantan Selatan mencapai 74,18 tahun, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 73,97 tahun. Angka ini menggambarkan perkiraan rata-rata usia yang akan dijalani oleh seorang bayi yang dilahirkan hidup di Kalimantan Selatan pada tahun 2024 hingga akhir hayatnya diharapkan akan mencapai 74,18 tahun dengan asumsi pola kematian menurut umur pada saat kelahiran (kohor) sama sepanjang usia bayi.

UHH penduduk Kalimantan Selatan tak terpaut jauh dari rata-rata nasional yang mencapai 74,15 tahun atau hanya terpaut 0,03 tahun. Selisih UHH penduduk Kalimantan Selatan dan seluru penduduk Indonesia kian mengecil dimana pada tahun 2023 masih terpaut sebesar 0,04 tahun. Dinamika ini seharusnya perlu dipelajari dan dievaluasi lebih lanjut.



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (diolah)

Gambar 2.2 Umur Harapan Hidup Hasil Long Form SP2020 Indonesia dan Kalimantan Selatan, 2020-2024 (tahun)

Sebagaimana indikator-indikator kesehatan pada umumnya, banyak faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat sebagai komponen pembentuk IPM. Mosley dan Chen mengembangkan kerangka analisis untuk studi tentang kelangsungan hidup anak. Konsep utama dalam kerangka ini adalah berkenaan dengan penyebab kematian. Mereka mengidentifikasi sekelompok faktor penentu yang dekat (*proximate determinants*) melalui

faktor-faktor sosial ekonomi (variabel independen) untuk memengaruhi kelangsungan hidup anak (variabel dependen). Kelompok faktor penentu tersebut adalah: faktor ibu (usia, paritas, dan interval kelahiran); kontaminasi lingkungan (udara, makanan/air/jari, kulit/tanah/benda mati, vektor serangga); kekurangan zat gizi (kalori, protein, mikronutrien); cedera (kecelakaan, disengaja), dan pengendalian penyakit pribadi (tindakan pencegahan pribadi, pengobatan medis). Faktor penentu yang dekat ini secara langsung memengaruhi risiko morbiditas dan kematian (Roosmalawati, 1991).

Salah satu faktor utama dalam tingkat derajat kesehatan masyarakat adalah pendidikan. Peningkatan derajat kesehatan penduduk yang ditandai dengan peningkatan UHH memiliki keterkaitan yang kuat dengan kualitas pendidikan, terutama pendidikan ibu dan wanita berusia produktif. Semakin tinggi tingkat pendidikan mereka, maka pemahaman mengenai pentingnya sanitasi, gizi keluarga, kesehatan reproduksi, tata cara merawat kehamilan maupun merawat bayi pascakelahiran, pengetahuan tentang penyakit menular dan pencegahannya maupun persepsi tentang usia reproduksi dan ukuran keluarga yang ideal juga akan semakin meningkat. Pada akhirnya, peningkatan pengetahuan tersebut akan mampu mengurangi jumlah insiden kematian bayi dan ibu yang terjadi selama masa persalinan maupun kematian anak dan ibu pasca persalinan.

Tantangan peningkatan pelayanan kesehatan dan pembangunan kesehatan semakin bertambah berat, kompleks, dan tidak terduga. Oleh sebab itu, peningkatan pelayanan kesehatan perlu memperhatikan dinamika penduduk, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan iptek dan semangat kemitraan, kerjasama lintas sektor serta mendorong peran aktif masyarakat.

Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkaitan erat dengan fasilitas kesehatan yang tersedia di suatu wilayah. Tersedianya fasilitas kesehatan yang mencukupi akan mempermudah masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan. Jumlah fasilitas kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan

terus meningkat. Penambahan ini sebagai bentuk peningkatan pelayanan kesehatan, seiring dengan terus meningkatnya jumlah penduduk provinsi ini. Pada tahun 2024, terdapat 43 rumah sakit umum yang beroperasi di Kalimantan Selatan, baik milik pemerintah maupun swasta. 43 rumah sakit umum ini tersebar di 13 kabupaten/kota. Selain itu, di Kalimantan Selatan juga terdapat 3 rumah sakit khusus, 6 rumah sakit bersalin, 54 puskesmas rawat inap, 188 puskesmas non rawat inap, 307 klinik pratama, dan 4.040 posyandu. Seluruh fasilitas kesehatan tersebut ditunjang dengan tenaga kesehatan sebanyak 2.877 tenaga medis, 49 psikologi klinis, 10.234 tenaga keperawatan, 5.943 tenaga kebidanan, 2.655 tenaga kefarmasian, 1.088 tenaga kesehatan masyarakat, 656 tenaga kesehatan lingkungan, 1.050 tenaga gizi, 214 tenaga keterampilan, 1.293 tenaga keteknisan medis, dan 1.927 tenaga teknik biomedika (BPS, 2025).

2.3 Capaian pada Dimensi Pendidikan

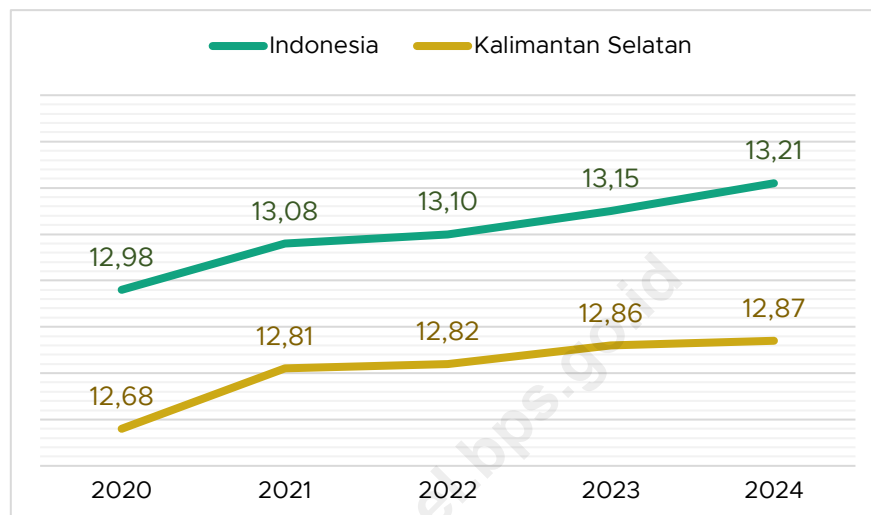
Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, maka semakin baik pula kualitas sumber daya manusianya. Banyak riset yang menunjukkan bahwa negara yang memprioritaskan pembangunan pendidikan cenderung tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan negara yang abai dengan pendidikan masyarakat.

Pendidikan merupakan sektor yang fundamental bagi sebuah negara. Pendidikan mampu memberikan manfaat signifikan bagi pembangunan, meski efek tersebut lebih bersifat jangka panjang dan terasa pada beberapa tahun mendatang. Pendidikan memberikan sumbangan yang besar terhadap perkembangan kehidupan sosial ekonomi melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, kecakapan, sikap, dan produktivitas, sehingga pendidikan diharapkan mampu menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas.

Dimensi pengetahuan diukur dengan indeks pendidikan yang merupakan indeks komposit dua indikator, yakni harapan lama sekolah (HLS)

penduduk usia 7 tahun dan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas.

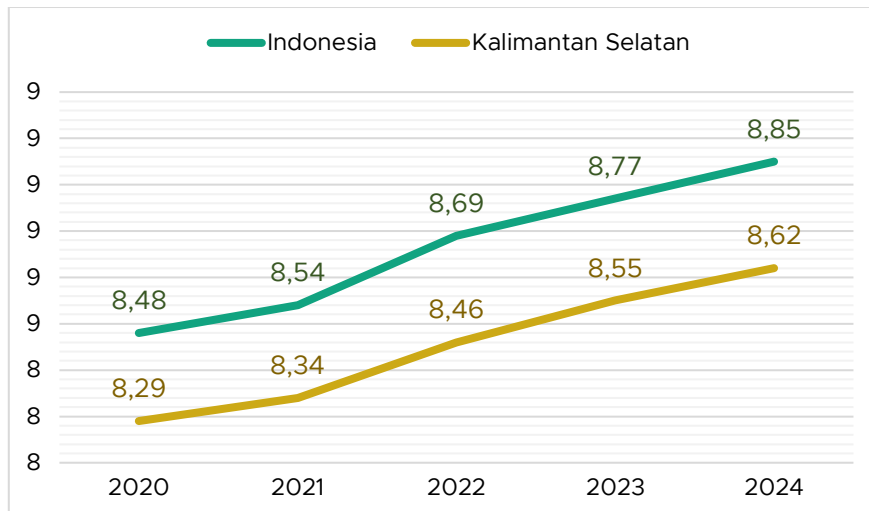
HLS merupakan lamanya durasi pendidikan formal (sekolah, dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh masyarakat pada umur tertentu di masa mendatang. HLS menunjukkan kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang disajikan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (diolah)

Gambar 2.3 Harapan Lama Sekolah Indonesia dan Provinsi Kalimantan Selatan, 2020–2024 (tahun)

Pada tahun 2024, HLS Kalimantan Selatan mencapai 12,87 tahun. Angka ini terus mengalami peningkatan pada periode lima tahun terakhir. Capaian HLS selama 12,87 tahun menggambarkan angka perkiraan durasi lama tahun bersekolah yang akan dijalani oleh penduduk Kalimantan Selatan berusia 7 tahun ke atas hingga mengenyam pendidikan setara dengan perguruan tinggi. Capaian HLS Kalimantan Selatan selama lima tahun terakhir, termasuk pada tahun 2024, lebih rendah dibandingkan dengan capaian HLS nasional. Pada tahun 2024, HLS secara nasional Indonesia mencapai 13,21 tahun.



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (diolah)

Gambar 2.4 Rata-Rata Lama Sekolah Indonesia dan Provinsi Kalimantan Selatan, 2020–2024 (tahun)

Indikator selanjutnya pada dimensi pendidikan adalah RLS. RLS digunakan untuk mengidentifikasi jenjang kelulusan pendidikan penduduk suatu daerah. Indikator ini dihitung dengan merata-ratakan durasi lama sekolah yang telah dijalani oleh masyarakat berusia 25 tahun ke atas di semua jenjang pendidikan formal. RLS dihitung secara simultan berdasarkan tiga variabel, yaitu partisipasi sekolah, tingkat/kelas yang sedang/pernah diduduki, dan jenjang pendidikan yang ditamatkan. RLS mengindikasikan tingkat atau jenjang pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah. Semakin tinggi RLS berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani.

RLS masyarakat Kalimantan Selatan berusia 25 tahun ke atas meningkat dari 8,55 tahun di tahun 2023 menjadi 8,62 tahun di tahun 2024. Angka sebesar 8,62 tahun ini menggambarkan rata-rata lamanya tahun pendidikan formal yang telah dijalani oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas. Dengan kata lain, penduduk di Kalimantan Selatan yang berusia 25 tahun ke atas rata-rata telah mengenyam pendidikan hingga kelas 2 SMP/ sederajat.

Capaian RLS Kalimantan Selatan menunjukkan penuntasan wajib belajar tingkat dasar dan menengah masih belum selesai, sehingga perlu upaya yang lebih intens lagi dari berbagai pihak sehingga minimal wajib belajar 12 tahun tercapai. Faktor utama dalam peningkatan pendidikan adalah

tersedianya SDM, dan sarana prasarana pendidikan yang lebih memadai. Ketersediaan kedua faktor tersebut diharapkan program pemerintah tentang wajib belajar akan dapat direalisasikan dengan lebih optimal.

Sarana dan prasarana pendidikan untuk menunjang pelayanan pendidikan di Kalimantan Selatan sudah cukup memadai secara kuantitas. Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang terangkum dalam publikasi Provinsi Kalimantan Selatan dalam Angka 2025 (BPS, 2025), pada semester gasal tahun ajaran 2024/2025, terdapat sebanyak 2.923 SD yang beroperasi di Kalimantan Selatan dengan tenaga pendidik sebanyak 30.414 guru, baik negeri maupun swasta. Sementara untuk SMP terdapat sebanyak 633 sekolah dengan 9.659 guru, untuk SMA sebanyak 210 sekolah dengan 5.052 guru, untuk SMK sebanyak 126 sekolah dengan 4.149 guru, dan untuk perguruan tinggi sebanyak 54 institusi dengan 3.680 tenaga pengajar dosen.

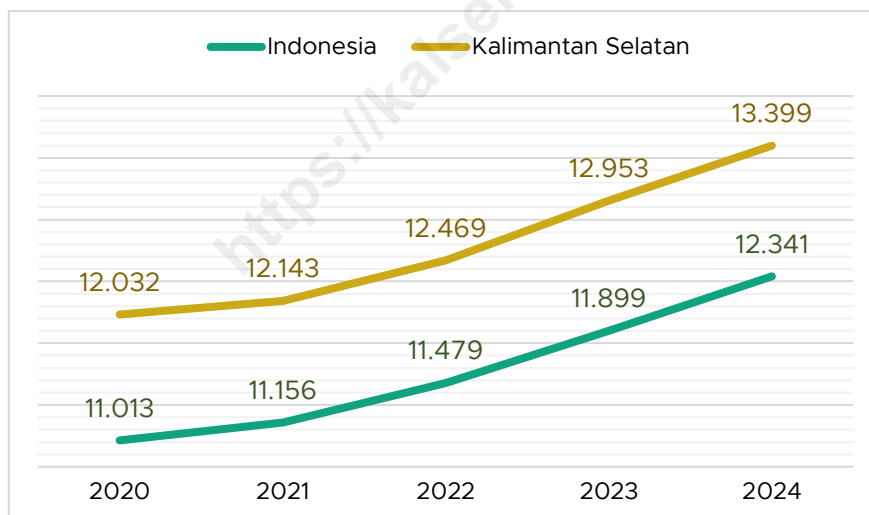
2.4 Capaian pada Dimensi Ekonomi

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya merupakan serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, dan meningkatkan hubungan ekonomi regional. Arah dari pembangunan ekonomi seharusnya adalah untuk mengusahakan agar pendapatan masyarakat meningkat dan disertai dengan tingkat pemerataan yang seluas mungkin.

Pembangunan ekonomi juga berorientasi seharusnya pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas hanya dapat diwujudkan jika digerakkan oleh peningkatan kapasitas produksi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas mempengaruhi pembangunan manusia diantaranya karena dapat menggerakkan pendapatan perkapita, dan menyerap tenaga kerja. Pada akhirnya, langkah-langkah ini dapat memperbaiki pola distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat, sehingga banyak peluang penduduk yang dapat

memenuhi kebutuhannya secara layak untuk membeli kebutuhan makanan, pendidikan, kesehatan dan perumahan. Alokasi belanja untuk investasi untuk kesehatan dan pendidikan secara tidak langsung akan mempercepat pembangunan manusia.

Indikator pengeluaran per kapita disesuaikan digunakan sebagai indikator pembangunan manusia dari sisi ekonomi. Indikator ini diukur berdasarkan hasil data konsumsi rumah tangga pada Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilaksanakan oleh BPS. Khusus untuk penghitungan IPM, data pengeluaran yang didapatkan melalui SUSENAS dideflasi dengan indikator paritas daya beli (*Purchasing Power Parity/PPP*). Proses deflasi ini akan mentransformasi data pengeluaran dari SUSENAS menjadi konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Paritas daya beli/dikenal sebagai komponen kemampuan daya beli atau standar hidup layak menunjukkan seberapa besar jumlah barang/jasa yang mampu dibeli oleh masyarakat yang disesuaikan dengan pendapatan yang diterima/dimiliki.



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (diolah)

Gambar 2.5 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Indonesia dan Provinsi Kalimantan Selatan, 2020–2024 (ribu rupiah/orang/tahun)

Pada tahun 2024, pengeluaran per kapita disesuaikan Kalimantan Selatan mencapai 13.399 ribu rupiah/orang/tahun. Capaian ini menunjukkan rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan masyarakat di Kalimantan Selatan. Selama lima tahun terakhir, indikator ini terus mengalami peningkatan

yang mengindikasikan terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan. Sama halnya dengan indikator kesehatan, indikator ekonomi juga menjadi indikator yang capaiannya lebih tinggi dibandingkan dengan capaian nasional. Pada tahun 2024, pengeluaran per kapita yang disesuaikan Indonesia adalah sebesar 12.341 ribu rupiah/orang/tahun. Dibandingkan dengan empat provinsi lain di regional Pulau Kalimantan, capaian Kalimantan Selatan merupakan yang tertinggi kedua setelah Kalimantan Timur.

Secara teori, pengeluaran per kapita sangat ditentukan oleh situasi makro ekonomi suatu daerah. Daya beli dapat terjaga selama masyarakat mempunyai penghasilan dan pekerjaan yang layak. Oleh karena itu, intervensi kebijakan pemerintah seharusnya bermuara pada peningkatan kondisi kesejahteraan masyarakat, salah satunya ditunjukkan oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Selain itu dari sisi konsumen, stabilitas harga dan pasokan komoditas kebutuhan rumah tangga juga diharapkan dapat terjaga secara stabil dan tidak berfluktuasi liar. Suplai komoditas strategis di setiap daerah, terutama bahan makanan pokok dan komoditas energi, harus terjaga secara berkelanjutan. Kebijakan perubahan harga kedua kelompok komoditas ini harus dipertimbangkan secara matang dan mendalam, karena akan berdampak sangat signifikan dan luas pada harga komoditas-komoditas lainnya. Peningkatan harga yang terjadi secara signifikan dan luas, akan berpengaruh pada penurunan daya beli masyarakat.

BAB III

CAPAIAN IPM KABUPATEN/KOTA

Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di bagian selatan Pulau Kalimantan. Wilayah administratif provinsi ini terbagi menjadi 13 terdiri atas 11 kabupaten dan 2 kota. Terdiri dari Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kabupaten Balangan. Sedangkan, wilayah kota terdiri dari Kota Banjarmasin dan Banjarbaru. Sejak tahun 2022, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022, Kota Banjarbaru resmi ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, menggantikan Kota Banjarmasin. Perubahan ini mencerminkan dinamika pembangunan dan pemerataan wilayah di provinsi tersebut.

Pada bagian ini akan diuraikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan komponen penyusunnya pada kabupaten/kota di Kalimantan Selatan yang dilihat berdasarkan capaian, perbandingan relatif, dan ketimpangan capaian.

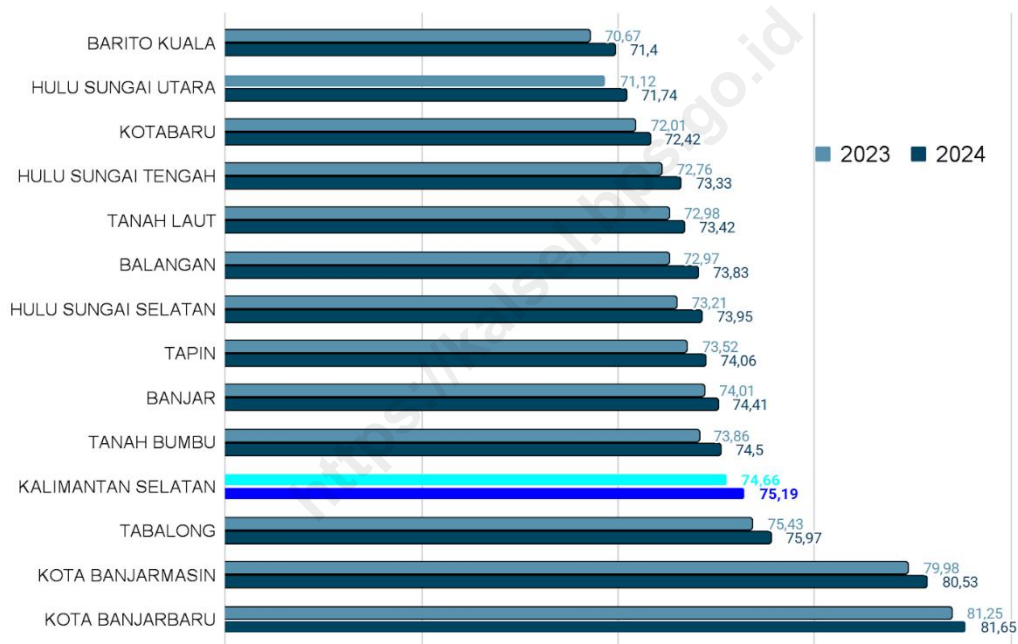
3.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan

IPM Kabupaten/kota di Kalimantan Selatan pada tahun 2024 berada pada kisaran angka dari 71,40 hingga 81,65. Kabupaten Barito Kuala merupakan wilayah dengan IPM terendah, sedangkan Kota Banjarbaru adalah wilayah dengan IPM tertinggi. Ada tiga kabupaten yang capaian IPM-nya di atas IPM Provinsi Kalimantan Selatan (sebesar 75,19), yakni Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tabalong. Sedangkan, 10 wilayah lainnya berada di bawah capaian IPM Provinsi Kalimantan Selatan. Ketiga wilayah yang berada di atas IPM provinsi, ternyata cukup kuat menarik angka IPM Provinsi Kalimantan Selatan.

Dari sisi klasifikasinya, IPM Kalimantan Selatan sudah masuk dalam kategori tinggi sejak tahun tahun 2018. Jika memperhatikan kabupaten/kota maka 2 kota di provinsi ini, yaitu Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru, masuk kategori sangat tinggi sedangkan 11 kabupaten dengan status pembangunan

manusia "tinggi" ($70 \leq \text{IPM} < 80$) di Kalimantan Selatan menjadi sebanyak 11 kabupaten.

Kota Banjarbaru, yang ditetapkan sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Selatan sejak 16 Maret 2022 menggantikan Kota Banjarmasin, memiliki IPM tertinggi dan masuk kategori sangat tinggi sejak tahun 2023. Pada 2024, status pembangunan manusia di Kota Banjarmasin meningkat dari "tinggi" menjadi "sangat tinggi", dengan capaian IPM 80,53. Hal ini menunjukkan capaian pembangunan manusia wilayah kota relatif lebih baik, Kota Banjarbaru unggul pada dimensi kesehatan dan pendidikan sedangkan Kota Banjarmasin unggul pada dimensi ekonomi.



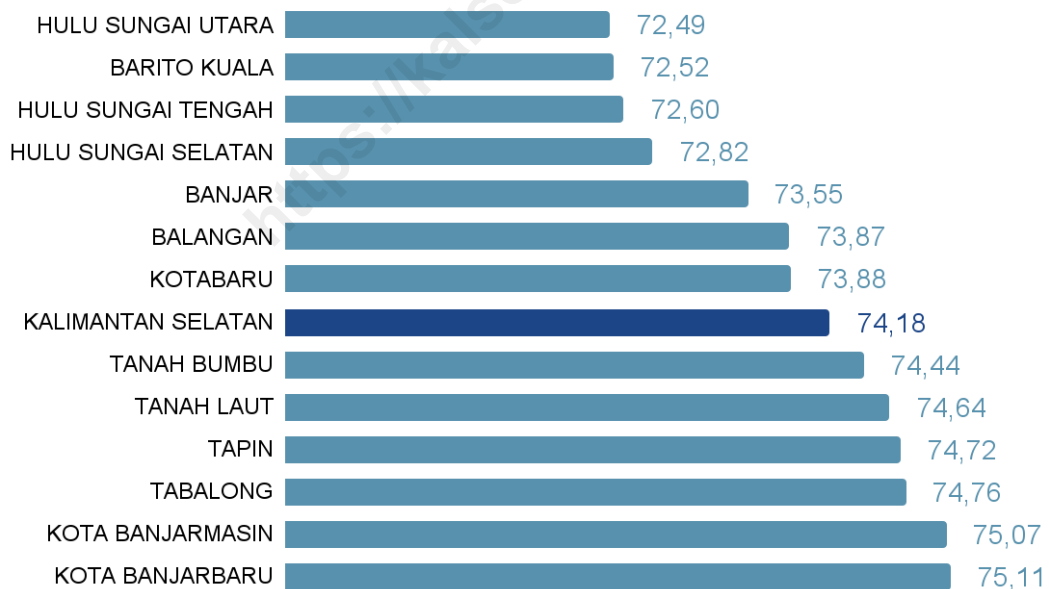
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (diolah)

Gambar 3.1 IPM Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan, 2023-2024

Tidak seperti pola yang terjadi pada IPM, umur harapan hidup kabupaten/kota di Kalimantan Selatan pada tahun 2024 relatif lebih homogen, yaitu berkisar antara 72,49 tahun hingga 75,11 tahun. Umur harapan hidup tertinggi pada Kota Banjarbaru yang sudah mencapai 75,11 tahun. Sedangkan, umur harapan hidup paling rendah sebesar 72,49 tahun di Kabupaten Hulu

Sungai Utara. Umur harapan hidup Kalimantan Selatan yang sebesar 74,18 tahun relatif berada di tengah. Ada enam kabupaten yang mempunyai umur harapan hidup di atas angka provinsi, sementara tujuh lainnya di bawah angka provinsi.

Wilayah perkotaan, seperti Banjarbaru dan Banjarmasin, masih mendominasi dalam capaian umur harapan hidup. Sementara 3 kabupaten di daerah Hulu Sungai (Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Selatan) dan kabupaten Batola berada di jajaran bawah. Meskipun demikian, selisih angkanya tidak terlalu besar. Ini mengindikasikan secara relatif pembangunan kesehatan di kabupaten yang kadangkala terkendala oleh akses ke pelayanan kesehatan yang terbatas sudah mulai mengejar ketertinggalannya dengan daerah perkotaan yang fasilitas kesehatannya lengkap dan akses yang relatif lebih terjangkau. Dengan demikian, ketersediaan fasilitas tersebut berperan penting dalam mendukung layanan kesehatan yang lebih optimal.

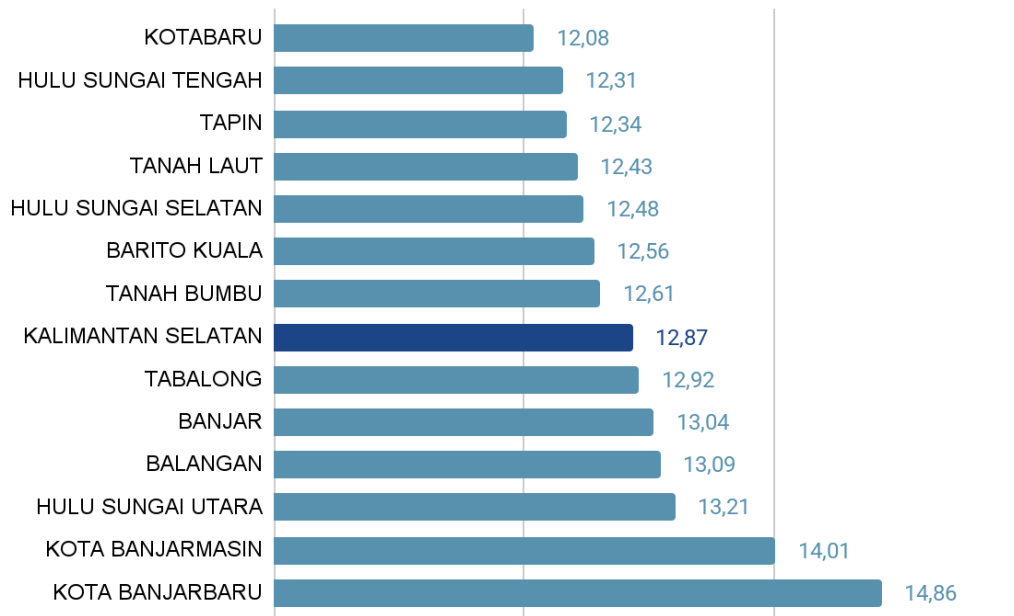


Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (diolah)

Gambar 3.2 Umur Harapan Hidup Provinsi/Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan, 2024 (tahun)

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Dari capaian harapan lama sekolah, terlihat Kota Banjarbaru dan Banjarmasin meninggalkan kabupaten lainnya. Kedua daerah ini sudah mencapai harapan lama sekolah lebih dari 14 tahun. Sementara itu, Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah menempati jajaran bawah dengan capaian masing-masing 12,08 dan 12,31 tahun.

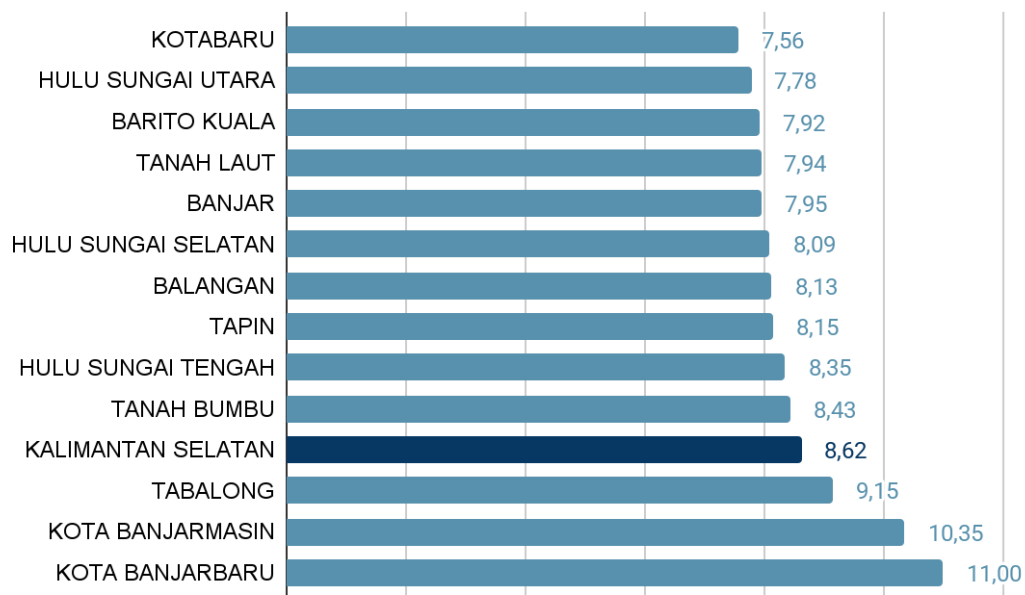
Harapan lama sekolah Kota Banjarbaru sebesar 14,86 tahun dan Kota Banjarmasin 14,01 tahun sudah mencapai level yang setara dengan perguruan tinggi. Artinya, partisipasi sekolah di Kota Banjarbaru sudah cukup bagus dan melewati dari target program wajib belajar 12 tahun. Penduduk Banjarbaru yang berusia sekolah 7-24 tahun mayoritasnya masih berada di bangku sekolah. Tingginya harapan lama sekolah di Banjarbaru dan Banjarmasin antara lain didorong oleh ketersediaan fasilitas pendidikan yang relatif lengkap, termasuk pada jenjang pendidikan tinggi. Kedua kota ini merupakan lokasi dari dua perguruan tinggi terbesar di Kalimantan Selatan, yaitu Universitas Lambung Mangkurat dan Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari. Secara khusus, Banjarbaru juga memposisikan dirinya sebagai pusat pendidikan dan kota pelajar, yang semakin memperkuat perannya dalam mendorong peningkatan partisipasi pendidikan masyarakat.



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (diolah)

Gambar 3.3 Harapan Lama Sekolah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan, 2024 (tahun)

Dimensi pengetahuan penyusun IPM lainnya adalah rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah digunakan untuk memberikan gambaran output dari program pembangunan pendidikan pada masa lalu. Sebab lama sekolah yang dimiliki seseorang dihitung saat mereka sudah berusia 25 tahun. Asumsinya pada umur 25 tahun, seseorang sudah selesai mengenyam bangku sekolah. Pada tahun 2024, Banjarbaru dan Banjarmasin menempati puncak, dengan rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas masing-masing sebesar 11,00 tahun dan 10,35 tahun. Hal ini menunjukkan keadaan konsisten antara wilayah capaian harapan lama sekolah tertinggi dan capaian rata-rata lama sekolah tertinggi. Sementara itu, rata-rata lama sekolah terendah adalah Kabupaten Kotabaru sebesar 7,56 tahun dan Hulu Sungai Utara sebesar 7,78 tahun.

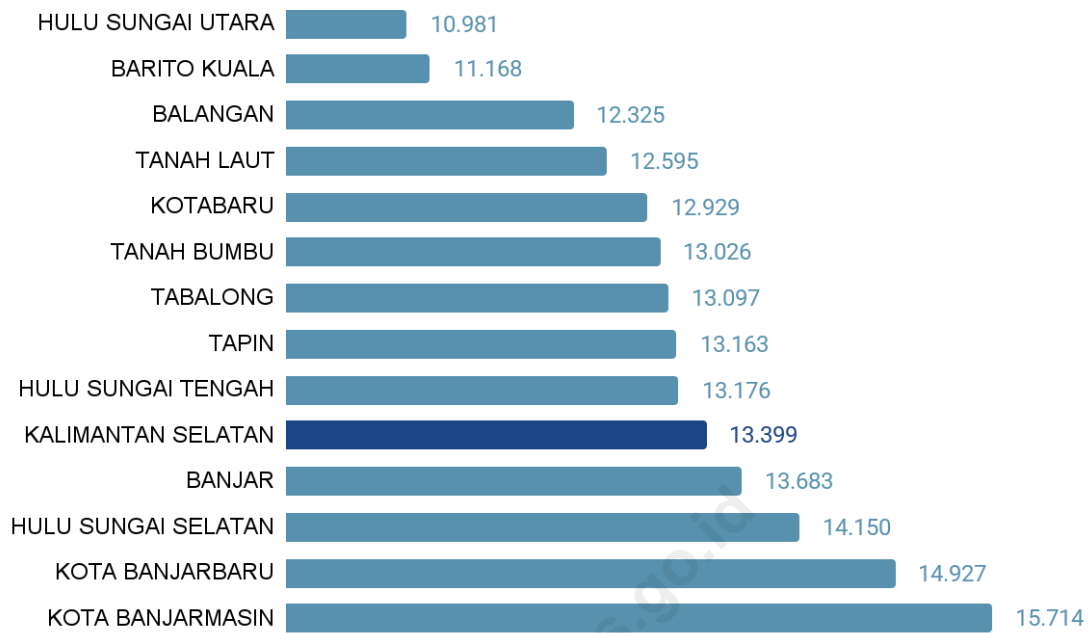


Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (diolah)

Gambar 3.4 Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan, 2024 (tahun)

Dimensi ketiga yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan). Pada 2024, pengeluaran per kapita (yang disesuaikan) masyarakat Kalimantan Selatan mencapai Rp13,399 ribu per tahun. Variasi indikator penyusun IPM antar kabupaten/kota di Kalimantan Selatan juga terjadi pada indikator pengeluaran per kapita disesuaikan. Bahkan dengan rentang yang cukup lebar, 10,981 ribu - 15,714 ribu per kapita selama tahun 2024. Pengeluaran per kapita terendah ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, sementara tertinggi ada di Kota Banjarmasin. Semakin besar pengeluaran per kapita menunjukkan semakin tingginya tingkat kemampuan penduduk dalam melakukan aktivitas konsumsi. Tingginya aktivitas konsumsi salah satu pendorong utamanya adalah pendapatan yang juga tinggi. Oleh karena itu, pengeluaran per kapita disesuaikan di sini dapat menjadi proksi untuk melihat tingkat kesejahteraan penduduknya. Dengan demikian, Banjarmasin dan

Banjarbaru relatif lebih unggul pada aspek ekonominya dibandingkan kabupaten/kota lain di Kalimantan Selatan.



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (diolah)

Gambar 3.5 Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan, 2024 (ribu rupiah)

3.2 Ketimpangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan

Kesenjangan IPM Banjarbaru dan Banjarmasin sebagai kota dengan capaian tertinggi pertama dan kedua, cukup jauh meninggalkan kabupaten lainnya yang berada pada urutan ketiga ke bawah. Ini menunjukkan ada gap yang cukup lebar dalam hal capaian pembangunan manusia. Situasi ini bisa disebabkan karena Banjarmasin dan Banjarbaru yang berstatus kota, sementara lainnya adalah kabupaten. Beberapa perbedaan mendasar antara kota dan kabupaten adalah terletak pada perbedaan kelengkapan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Fasilitas di kota yang lebih lengkap dibanding kabupaten memberikan peluang bagi peningkatan capaian pembangunan manusia yang tinggal di dalamnya. Selain fasilitas, perbedaan mendasar lainnya adalah luas wilayah. Luas kabupaten di Kalimantan Selatan yang jauh lebih besar dibanding kota menjadikan rentang kendali di kabupaten lebih jauh dan berat.

Banyak ukuran yang dapat digunakan untuk melihat ketimpangan, dari yang paling sederhana hingga yang kompleks. Ketimpangan dalam statistik

dapat berarti dispersi dan/atau keragaman. Semakin besar dispersi dan atau keragaman, semakin besar pula ketimpangan yang terjadi.

Ketimpangan semakin membesar dapat terjadi apabila terdapat beberapa kemungkinan berikut:

1. Selisih antar nilai terendah hingga tertinggi semakin jauh. Yang tinggi semakin meningkat dan/atau yang kecil semakin menurun.
2. Rata-rata simpangan baku membesar terhadap rata-rata data.

Jika ketimpangan semakin membesar, maka diperlukan upaya agar ketimpangan tidak semakin melebar. Hal ini disebabkan ketimpangan yang semakin melebar menunjukkan bahwa daerah yang tertinggal belum optimal mengejar ketertinggalannya. Ketimpangan pembangunan manusia yang akut juga dapat berdampak pada berbagai masalah sosial lainnya.

Tabel 3.1 Ukuran Disparitas IPM dan Indikator Pembentuk IPM antar Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan, 2020-2024

| Indikator | Ukuran Disparitas | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPM | Min-Max | 11,61 | 11,33 | 10,95 | 10,58 | 10,25 |
| | Standar Deviasi | 3,23 | 3,19 | 3,09 | 3,01 | 2,96 |
| | Koefisien Deviasi | 4,45 | 4,38 | 4,21 | 4,06 | 3,97 |
| UHH | Min-Max | 3,08 | 2,90 | 2,75 | 2,69 | 2,62 |
| | Standar Deviasi | 1,13 | 1,09 | 1,05 | 0,99 | 0,96 |
| | Koefisien Deviasi | 1,54 | 1,49 | 1,43 | 1,35 | 1,30 |
| HLS | Min-Max | 2,88 | 2,87 | 2,79 | 2,78 | 2,78 |
| | Standar Deviasi | 0,81 | 0,78 | 0,76 | 0,74 | 0,74 |
| | Koefisien Deviasi | 6,39 | 6,13 | 5,96 | 5,76 | 5,74 |
| RLS | Min-Max | 3,61 | 3,50 | 3,51 | 3,44 | 3,44 |
| | Standar Deviasi | 1,07 | 1,07 | 1,04 | 1,01 | 1,00 |
| | Koefisien Deviasi | 13,09 | 12,9 | 12,37 | 11,92 | 11,69 |
| Pengeluaran per Kapita | Min-Max | 4.779,00 | 4.778,00 | 4.638,00 | 4.789,00 | 4.733,00 |
| | Standar Deviasi | 1.279,50 | 1.283,03 | 1.254,94 | 1.275,71 | 1.262,03 |
| | Koefisien Deviasi | 10,82 | 10,74 | 10,22 | 10,04 | 9,60 |

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (diolah)

Ukuran ketimpangan yang digunakan dalam pembahasan di sini adalah range maksimum-minimum; standar deviasi; dan koefisien variasi. Ketiga ukuran ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Range = Nilai Data Maksimum - Nilai Data Minimum

Standar Deviasi = $\sqrt{\frac{\sum(x-\bar{x})^2}{N}}$

Koefisien Variasi = (Standar Deviasi/Rata-Rata) x 100%

dimana x adalah nilai sebuah data pada masing-masing kabupaten/kota dan N adalah jumlah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, yakni sebanyak 13.

Tabel 3.1 menyajikan tiga jenis ukuran dispersi, yaitu *range* (Min-Max), standar deviasi, dan koefisien deviasi, baik untuk IPM secara keseluruhan maupun untuk masing-masing indikator penyusunnya, selama periode 2020 hingga 2024. Secara umum, ukuran *range* atau selisih antara nilai tertinggi dan terendah menunjukkan tren penurunan yang konsisten untuk IPM, Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dari tahun 2020 hingga 2024. Namun demikian, pada tahun 2024, nilai *range* untuk indikator HLS dan RLS tercatat tetap atau stabil jika dibandingkan dengan tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa disparitas antar wilayah yang dilihat dari ukuran *range* dalam dua indikator tersebut belum mengalami perbaikan lebih lanjut pada tahun tersebut. Sementara itu, *range* pengeluaran per kapita menunjukkan pola yang cenderung fluktuatif selama periode 2020–2024. Setelah mengalami kenaikan pada tahun 2023, *range* kembali menurun di tahun 2024. Pola ini mencerminkan bahwa disparitas pengeluaran per kapita antar wilayah memiliki volatilitas yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan indikator-indikator penyusun IPM lainnya, yang umumnya menunjukkan tren penurunan yang lebih konsisten.

Ukuran kedua yang digunakan adalah standar deviasi, yaitu indikator statistik yang mengukur rata-rata penyimpangan nilai terhadap nilai tengahnya. Berbeda dengan *range* yang hanya melihat nilai ekstrim, standar deviasi mencerminkan keragaman data secara keseluruhan, sehingga memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai variasi antarwilayah.

Sepanjang tahun 2020 hingga 2024, standar deviasi sebagian besar indikator, seperti IPM, Umur Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, dan Rata-rata Lama Sekolah, mengalami penurunan secara bertahap yang mencerminkan penyebaran nilai antarwilayah yang makin seragam. Hal ini menandakan perbaikan dalam ketimpangan pembangunan manusia. Untuk indikator pengeluaran per kapita, pola yang terbentuk cenderung tidak konsisten. Setelah mengalami kenaikan pada tahun 2023, standar deviasi kembali menurun di tahun 2024. Meskipun demikian, fluktuasi ini mengindikasikan bahwa variasi pengeluaran antardaerah masih cukup dinamis, dan belum menunjukkan tren penurunan yang stabil sebagaimana terlihat pada indikator sosial lainnya.

Ukuran ketiga adalah koefisien variasi, yang mengukur ketimpangan relatif dengan membandingkan standar deviasi terhadap nilai rata-rata, serta memungkinkan perbandingan antarindikator yang berbeda satuan. Tidak seperti dua ukuran sebelumnya, koefisien variasi menunjukkan tren penurunan yang konsisten pada semua indikator, termasuk pengeluaran per kapita. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan relatif terus menyempit, meskipun beberapa indikator masih menunjukkan variasi antarwilayah.

BAB IV

ANALISIS KORELASI MIGRASI RISEN TERHADAP RATA-RATA LAMA SEKOLAH DI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2024: APAKAH TERJADI *BRAIN-GAIN*?

4.1 Pengantar Teori *Brain-Gain* dari Proses Migrasi

Konsep dasar *brain-gain* merupakan fenomena yang menarik dalam konteks globalisasi dan mobilitas tenaga kerja. *Brain-gain* merujuk pada migrasi individu yang memiliki pendidikan tinggi, keterampilan yang baik, atau motivasi yang tinggi ke suatu wilayah yang lebih maju, di mana mereka dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi dan sosial. Fenomena ini menjadi kebalikan dari *brain-drain*, yaitu emigrasi tenaga kerja terampil dari daerah asal yang sering kali mengakibatkan kerugian bagi daerah tersebut. Dalam konteks ini, *brain-gain* dipandang sebagai sisi positif dari migrasi tenaga terampil karena dapat memperkuat basis modal manusia di daerah tujuan dan bahkan berpotensi menggantikan kerugian akibat *brain-drain* (Clemens, 2014). Oleh karena itu, memahami dinamika antara *brain-drain* dan *brain-gain* menjadi sangat penting, terutama dalam merancang kebijakan kependudukan yang berdampak terhadap peningkatan tingkat pendidikan dan kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah.

Dalam konteks *brain-gain*, individu yang memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan tinggi cenderung bermigrasi ke wilayah yang menawarkan prospek pekerjaan yang lebih baik dan standar hidup yang lebih tinggi. Sebagai contoh, seorang pengembang perangkat lunak mungkin memilih pindah dari daerah berkembang ke daerah yang lebih maju demi memperoleh penghasilan yang lebih besar dan akses terhadap fasilitas profesional yang lebih lengkap. Perpindahan ini tidak hanya menguntungkan individu tersebut secara pribadi, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap kemajuan teknologi dan pembangunan ekonomi di wilayah tujuan. Dengan demikian, *brain-gain*

menciptakan manfaat ganda: memperkuat daya saing ekonomi daerah penerima serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor strategis (Hanggraeni, 2012).

Dari perspektif daerah asal, *brain-drain* dapat memberikan dampak yang merugikan. Ketika individu-individu terampil dan berpendidikan tinggi meninggalkan daerah mereka, hal ini dapat menyebabkan kekurangan tenaga kerja di sektor-sektor penting seperti kesehatan, pendidikan, dan teknologi. Sebagai contoh, di banyak wilayah Afrika, banyak dokter dan perawat yang memilih untuk bekerja di negara-negara Barat, meninggalkan sistem kesehatan di daerah asal dalam kondisi kekurangan tenaga medis yang berkualitas. Dovlo (2005) mencatat bahwa migrasi profesional kesehatan dari Afrika Sub-Sahara telah memperparah kekurangan tenaga kerja kesehatan, melemahkan sistem pelayanan yang sudah rapuh, dan membatasi akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan esensial. Dalam jangka panjang, fenomena ini berpotensi menghambat perkembangan ekonomi dan sosial di daerah asal.

Dalam konteks yang lebih luas, *brain-gain* juga dapat dilihat sebagai bagian dari fenomena yang lebih besar, yaitu pertukaran pengetahuan dan keterampilan antar daerah (Anwarudin et al., 2020). Ketika individu-individu terampil bermigrasi, mereka tidak hanya membawa keterampilan dan pengetahuan mereka, tetapi juga menciptakan jaringan antar wilayah yang dapat memfasilitasi pertukaran ide dan kolaborasi. Misalnya, seorang pekerja dengan *skill* tinggi yang pindah ke daerah baru untuk bekerja dapat berkolaborasi dengan rekan-rekan di daerah barunya, menciptakan penyebaran pengetahuan yang menguntungkan kedua belah pihak.

Selain itu, penting untuk diperhatikan bahwa *brain-gain* maupun *brain-drain* merupakan dampak dari proses migrasi. Ada risiko bahwa ketergantungan pada migrasi tenaga kerja terampil dapat mengalihkan perhatian dari upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan di daerah yang menjadi tujuan migran. Oleh karena itu, penting bagi daerah-

daerah untuk menciptakan sistem yang mendukung pengembangan keterampilan dan pengetahuan di wilayahnya masing-masing.

4.2 Hubungan Migran Risen dengan Komponen IPM Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Menurut BPS Provinsi Kalimantan Selatan (2023) migrasi risen adalah suatu kondisi jika seseorang bertempat tinggal berbeda antara kabupaten/kota yang ditempati sekarang dengan kabupaten/kota yang ditempati 5 tahun yang lalu. Migran risen sedikit banyaknya memiliki peluang dengan tingkat pendidikan lebih tinggi daripada rata-rata masyarakat lokal yang dapat secara langsung meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) suatu wilayah. Karena RLS dihitung berdasarkan rata-rata tahun sekolah penduduk dewasa (25 tahun ke atas), masuknya individu yang telah menyelesaikan pendidikan menengah atau tinggi akan menaikkan angka tersebut secara statistik. Dalam studi-studi tentang dampak migrasi terhadap indikator pendidikan, efek ini dikenal sebagai *composition effect*, yaitu perubahan dalam rata-rata akibat perubahan karakteristik populasi Beine et al. (2008).

Penting untuk menekankan bahwa peningkatan RLS akibat migrasi risen tidak selalu mencerminkan kemajuan dalam sistem pendidikan lokal. Seperti dijelaskan dalam literatur, peningkatan RLS (peningkatan *human capital*) dalam konteks migrasi lebih merepresentasikan akumulasi modal manusia melalui selektivitas migran daripada hasil langsung dari kebijakan pendidikan di wilayah tersebut (Beine et al., 2008). Dengan demikian, angka RLS dapat mengalami bias jika tidak disertai dengan pemahaman tentang struktur demografis dan arus migrasi yang terjadi.

Selain itu, migran risen juga dapat memengaruhi RLS dalam jangka panjang melalui peningkatan aspirasi pendidikan di kalangan penduduk lokal. Kehadiran individu berpendidikan tinggi di lingkungan sosial dapat menciptakan efek demonstratif yang mendorong masyarakat untuk menilai pendidikan sebagai sarana mobilitas sosial. Menurut Gould et al. (2010), paparan terhadap individu dengan latar belakang pendidikan tinggi memiliki

korelasi positif terhadap peningkatan partisipasi sekolah di kelompok usia muda.

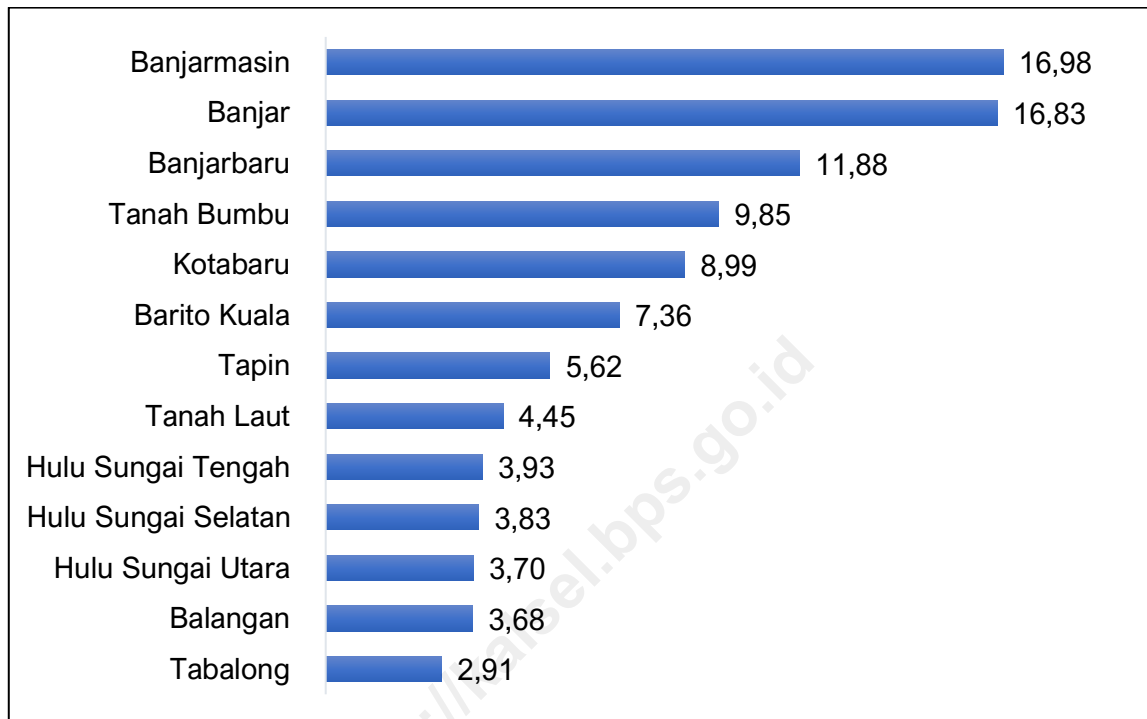
Migran risen juga berpotensi memperkuat ekosistem pendidikan lokal melalui kontribusi aktif dalam kegiatan pembelajaran, baik formal maupun non-formal. Dalam banyak kasus, mereka menjadi mentor, fasilitator pelatihan, atau sumber inspirasi dalam forum-forum komunitas. Beine et al. (2008) menekankan pentingnya *diaspora externalities*, yakni manfaat eksternal tidak langsung dari keberadaan migran terdidik, seperti fasilitasi difusi teknologi, hubungan dagang, dan transfer keterampilan. Meski tidak secara eksplisit membahas sektor pendidikan, konsep ini membuka kemungkinan bahwa kehadiran diaspora juga dapat memperkuat kapasitas pengetahuan lokal, termasuk dalam hal aspirasi pendidikan.

Berdasarkan uraian pendahuluan, ada kemungkinan bahwa datangnya migran risen mampu untuk meningkatkan capaian RLS melalui *composition effect*. Penelitian terkait migrasi risen masih sangat terbatas dan untuk kasus di Kalimantan Selatan walaupun telah diteliti oleh Murjani et al. (2023), pembahasannya masih belum menyentuh hubungannya dengan pendidikan masyarakat lokal. Tulisan ini akan membahas hubungan antara migran risen dengan kondisi pendidikan di Kalimantan Selatan tahun 2024 yang dalam hal ini direpresentasikan oleh RLS dalam kaitannya dengan Indeks Pembangunan Manusia.

4.3 Gambaran Migran Risen di Kalimantan Selatan Tahun 2024

Berbeda dengan penelitian sebelumnya oleh Murjani et al. (2023) yang menggunakan data Sensus Penduduk 2020 Long Form, studi ini memanfaatkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024. Kuesioner Sensus Penduduk 2020 Long Form memuat pertanyaan terperinci mengenai alasan perpindahan dari kabupaten/kota asal, sementara informasi tersebut tidak tersedia dalam Susenas. Keterbatasan ini mengakibatkan analisis dalam studi

ini bersifat lebih umum dengan memandang migran masuk (migran risen) ke Kalimantan Selatan sebagai kelompok heterogen yang berpindah dengan beragam latar belakang dan motivasi. Meskipun demikian, studi ini tetap memberikan kontribusi penting dalam menjawab pertanyaan mengenai keterkaitan antara keberadaan migran risen dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).



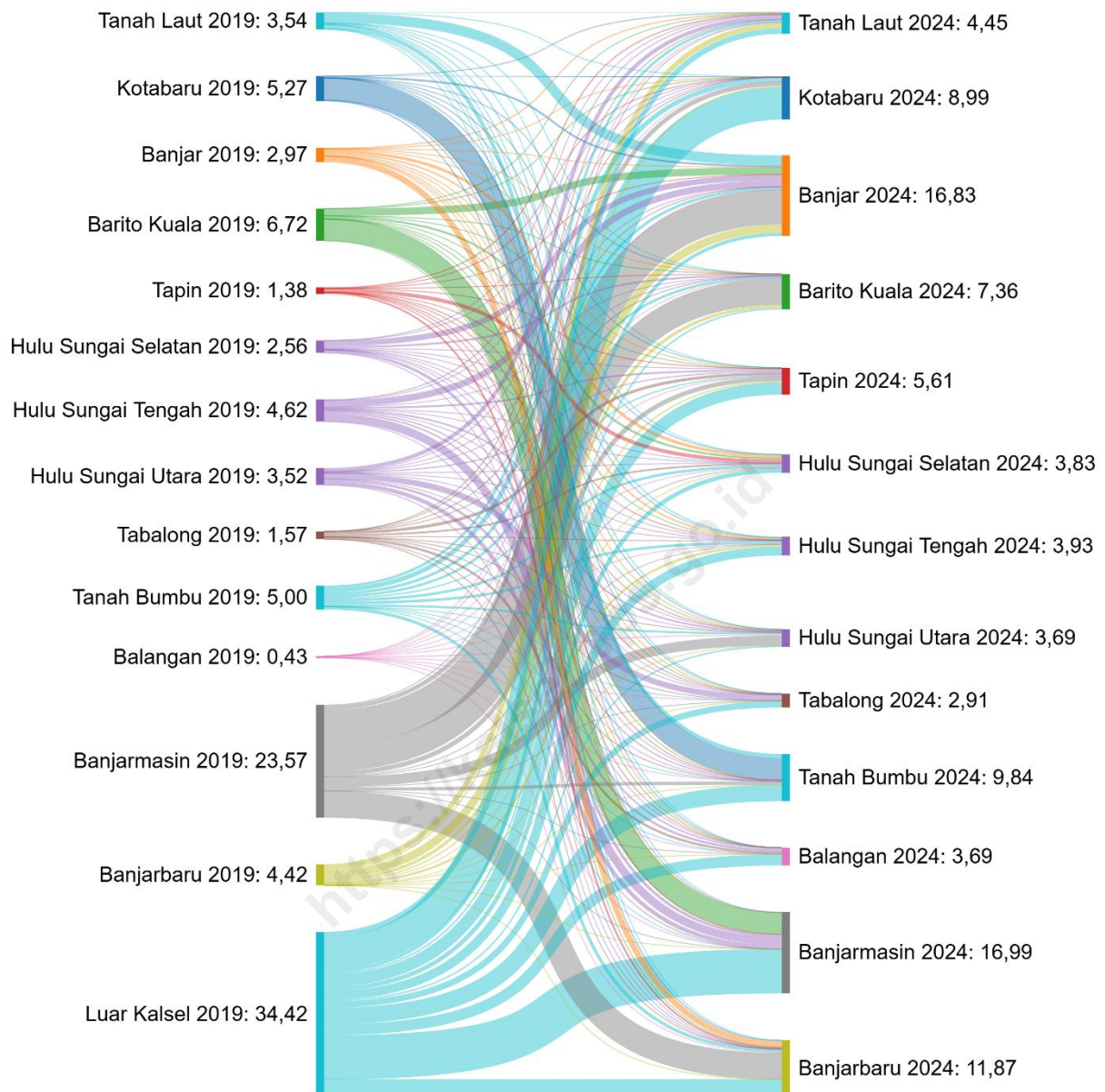
Catatan: Semua RSE indikator < 50%

Sumber: Hasil olah Susenas 2024

Gambar 4.1 Proporsi Migran Risen per Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, 2024 (%)

Gambar 4.1 menunjukkan bahwa distribusi migran risen di Kalimantan Selatan pada tahun 2024 bersifat tidak merata antar wilayah. Kota Banjarmasin mencatat proporsi tertinggi (16,98 persen), diikuti oleh Kabupaten Banjar (16,83 persen) dan Banjarbaru (11,88 persen). Ketiga wilayah ini secara struktural berperan sebagai daerah tujuan utama migrasi masuk dan termasuk daerah metropolitan Banjar Bakula. Sebaliknya, Kabupaten Tabalong mencatat proporsi migran risen terendah (2,91 persen), diikuti oleh Balangan (3,68 persen) dan Hulu Sungai Utara (3,70 persen). Distribusi ini mencerminkan perbedaan kapasitas wilayah dalam menarik penduduk dari luar yang dapat dikaitkan dengan aksesibilitas geografis, dinamika pasar tenaga kerja, serta tingkat urbanisasi. Variasi ini memberikan gambaran awal mengenai potensi

perbedaan karakteristik migrasi antar wilayah di Kalimantan Selatan yang dapat dikaji lebih lanjut dalam analisis berikutnya.



Catatan: Semua RSE indikator < 50%

Sumber: Hasil olah Susenas 2024

Gambar 4.2 Proporsi Arus Perpindahan Migran Risen per Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, 2019–2024 (%)

Gambar 4.2 menyajikan gambaran arus migran risen di Kalimantan Selatan, yaitu individu yang pada tahun 2024 berdomisili di suatu kabupaten/kota, namun pada tahun 2019 tinggal di wilayah yang berbeda. Sisi kiri menggambarkan daerah asal migran pada tahun 2019, sementara sisi kanan menunjukkan lokasi tempat tinggal mereka saat ini (2024). Mayoritas migran

risen tercatat berasal dari luar Kalimantan Selatan (34,42 persen) yang kemudian menetap di berbagai kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan.

Kota Banjarmasin menjadi daerah tujuan utama dengan proporsi migran risen tertinggi pada tahun 2024 (16,99 persen), diikuti oleh Kabupaten Banjar (16,83 persen) dan Kota Banjarbaru (11,87 persen). Pola ini mencerminkan pergeseran penduduk menuju wilayah-wilayah urban yang memiliki peran strategis dalam perekonomian dan pelayanan publik. Kota-kota dengan karakteristik perkotaan dan aksesibilitas tinggi cenderung menjadi magnet migrasi, baik karena faktor kesempatan kerja, pendidikan, maupun infrastruktur.

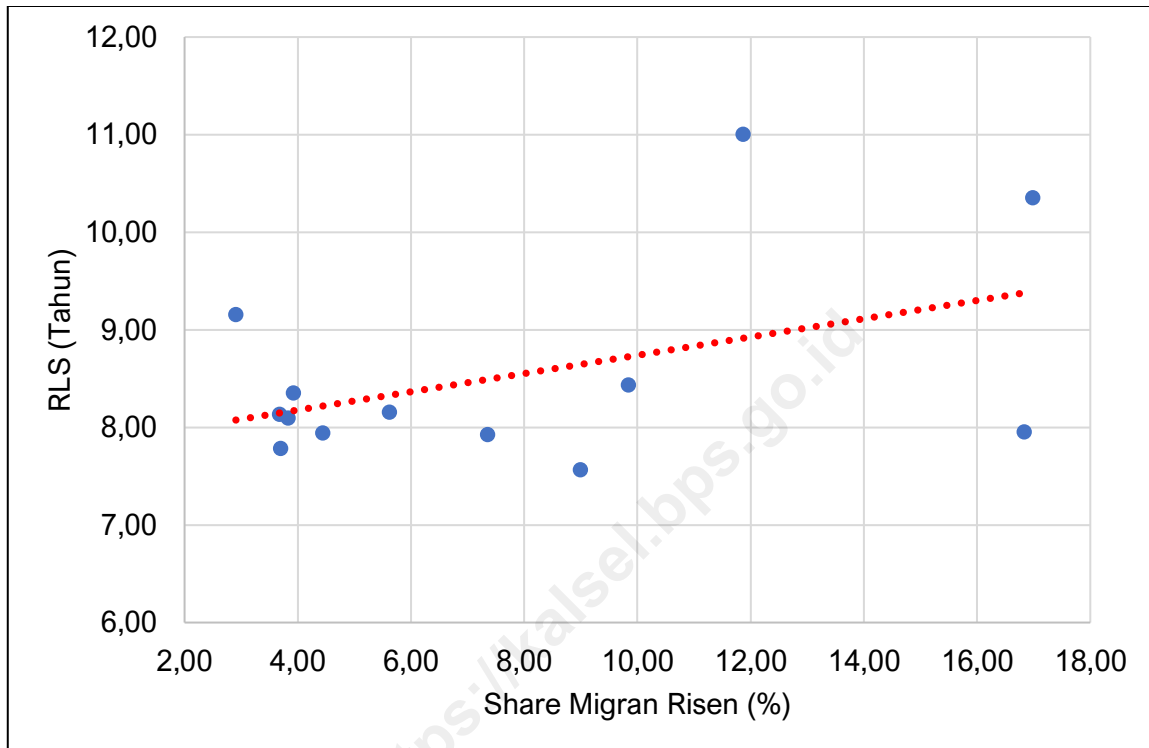
Sementara itu, sebagian besar kabupaten lain seperti Balangan, Hulu Sungai Selatan, dan Tabalong menunjukkan proporsi migran risen yang lebih rendah, baik sebagai daerah asal maupun tujuan. Hal ini mengindikasikan bahwa dinamika migrasi risen lebih terkonsentrasi di wilayah-wilayah dengan kapasitas penyerapan penduduk yang lebih besar dan daya tarik ekonomi yang lebih kuat.

Visualisasi ini juga memperlihatkan bahwa mobilitas penduduk antarwilayah di dalam Provinsi Kalimantan Selatan (intra-provinsi) cukup signifikan, namun arus dari luar provinsi (inter-provinsi), seperti dari kelompok "Luar Kalsel", tetap menjadi salah satu sumber utama migrasi risen. Secara keseluruhan, pola arus migrasi risen ini mencerminkan kecenderungan urbanisasi dan konsentrasi penduduk di pusat-pusat perekonomian. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Murjani et al. (2023), meskipun studi tersebut lebih menekankan pada migran risen karena alasan pekerjaan, sedangkan analisis ini mencakup seluruh migran risen tanpa membedakan alasan perpindahan.

4.4 Keterkaitan antara Migran Risen dan Peningkatan RLS di Kalimantan Selatan Tahun 2024

Bagian ini menyajikan analisis kuantitatif korelasi antara proporsi migran risen dengan peningkatan RLS di berbagai kabupaten/kota di

Kalimantan Selatan pada tahun 2024. Metode statistik yang digunakan dapat berupa korelasi Pearson yang tujuannya adalah untuk menguji secara empiris apakah terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara konsentrasi migran risen dan peningkatan rata-rata lama sekolah, sehingga dapat mendukung hipotesis bahwa migrasi tersebut berpotensi sebagai sumber *brain-gain*.



Sumber: Hasil olah Susenas 2024

Gambar 4.3 Scatter Plot Share Migran Risen (%) dan Nilai RLS (tahun) Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, 2024

Gambar 4.3 memperlihatkan pola penyebaran antara *share* migran risen (%) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di kabupaten/kota Kalimantan Selatan tahun 2024. Tampak bahwa terdapat variasi nilai RLS pada hampir seluruh rentang proporsi migran risen. Sebagai contoh, pada wilayah dengan *share* migran risen antara 4–6 persen, nilai RLS bervariasi dari di bawah 8 tahun hingga mendekati 10 tahun, mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan rata-rata belum sepenuhnya selaras dengan proporsi migran risen di suatu daerah.

Namun demikian, garis tren linier positif dalam grafik menunjukkan adanya kecenderungan bahwa wilayah dengan proporsi migran risen yang lebih

tinggi cenderung memiliki nilai RLS yang lebih tinggi pula. Pola ini terutama terlihat pada daerah-daerah dengan *share* migran risen di atas 10 persen, di mana mayoritas titik data berada di atas rata-rata provinsi dalam hal RLS.

Meskipun demikian, terdapat pula *outlier* yang memiliki RLS tinggi meskipun proporsi migran risennya relatif sedang, serta wilayah dengan RLS rendah meskipun *share* migran risen-nya cukup tinggi yang menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel tidak bersifat deterministik atau linier sempurna.

Oleh karena itu, sebelum menarik kesimpulan mengenai adanya hubungan signifikan secara statistik antara *share* migran risen dan RLS, diperlukan analisis kuantitatif lanjutan, seperti uji korelasi, yang akan dilakukan dalam tahap analisis berikutnya. Analisis deskriptif ini memberikan gambaran awal mengenai arah dan pola sebaran data yang dapat dijadikan dasar untuk pengujian lebih lanjut.

Tabel 4.1 Matriks Korelasi Share Migran Risen dengan RLS Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, 2024

| | Share Migran Risen 2024 | RLS 2024 |
|-------------------------|-------------------------|----------|
| Share Migran Risen 2024 | 1 | |
| RLS 2024 | 0,446 | 1 |

Catatan: $r = 0,446$ memiliki $p\text{-value} = 0,127$ (tidak signifikan)

Tabel 1 menunjukkan hasil analisis korelasi antara *share* migran risen tahun 2024 dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di tingkat kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Nilai koefisien korelasi Pearson (r) sebesar 0,446 mengindikasikan adanya hubungan positif yang moderat (mendekati 0,5) antara proporsi migran risen dan RLS. Artinya, terdapat kecenderungan bahwa daerah dengan proporsi migran risen yang lebih tinggi memiliki RLS yang lebih tinggi pula, meskipun hubungan tersebut tidak begitu kuat.

Namun demikian, nilai probabilitas sebesar 0,127 menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel tidak signifikan pada tingkat signifikansi 1%, 5%, maupun 10%. Dengan kata lain, tidak terdapat cukup bukti statistik untuk

menyatakan adanya asosiasi yang bermakna antara *share* migran risen dan RLS di Kalimantan Selatan pada tahun 2024.

Hasil ini mencerminkan bahwa variasi RLS antar wilayah tidak dapat dijelaskan secara langsung oleh besarnya proporsi migran risen semata. Oleh karena itu, diperlukan analisis lanjutan yang mempertimbangkan variabel-variabel lain, seperti karakteristik sosial-ekonomi migran, kapasitas layanan pendidikan di daerah tujuan, serta dinamika urbanisasi dan pasar tenaga kerja.

4.5 Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji keterkaitan antara migrasi risen dan RLS sebagai salah satu indikator pembangunan manusia di Kalimantan Selatan tahun 2024. Dengan mengacu pada konsep *brain-gain*, studi ini mengevaluasi apakah kehadiran migran risen yang diduga memiliki latar belakang pendidikan lebih tinggi dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah tujuan, khususnya melalui peningkatan RLS.

Hasil analisis menunjukkan bahwa distribusi migran risen tidak merata antarwilayah, dengan konsentrasi tertinggi di wilayah urban seperti Kota Banjarmasin (16,99%), Kabupaten Banjar (16,83%), dan Kota Banjarbaru (11,87%). Ketiga wilayah ini merupakan pusat ekonomi dan pelayanan publik yang strategis di Kalimantan Selatan sebagai bagian dari wilayah metropolitan Banjar Bakula. Sebaliknya, daerah-daerah seperti Tabalong, Balangan, dan Hulu Sungai Utara mencatat proporsi migran risen yang relatif rendah.

Secara visual, terdapat kecenderungan bahwa kabupaten/kota dengan proporsi migran risen yang lebih tinggi cenderung memiliki RLS yang lebih tinggi pula. Namun, hasil uji korelasi menunjukkan nilai koefisien korelasi Pearson sebesar 0,446 dengan $p\text{-value} = 0,127$, yang berarti tidak signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 1%, 5%, dan 10%. Dengan demikian, belum terdapat bukti kuat bahwa migrasi risen secara langsung berkorelasi dengan peningkatan rata-rata lama sekolah di Kalimantan Selatan tahun 2024.

Temuan ini mengindikasikan bahwa kontribusi migrasi risen terhadap peningkatan kualitas pendidikan tidak bersifat otomatis, melainkan

sangat bergantung pada faktor lain, seperti karakteristik sosial-ekonomi migran, kapasitas sistem pendidikan lokal, dan keterlibatan aktif migran dalam lingkungan sosial. Meskipun konsep *composition effect* menyatakan bahwa kehadiran individu berpendidikan tinggi dapat menaikkan rata-rata statistik pendidikan, dalam konteks Kalimantan Selatan tahun 2024, efek tersebut belum muncul secara signifikan.

Untuk ke depan, penelitian lanjutan dengan pendekatan multivariat dan data panel diperlukan guna menangkap dinamika temporal dan interaksi antarvariabel yang lebih kompleks. Selain itu, eksplorasi terhadap karakteristik migran risen secara lebih rinci, seperti latar belakang pendidikan, alasan perpindahan, dan peran mereka di masyarakat tujuan, akan sangat penting untuk memahami potensi *brain-gain* secara substantif, bukan sekadar indikatif.

DAFTAR PUSTAKA

<https://dapo.kemdikbud.go.id/sp> diakses 22 Mei 2024

- Anwarudin, O., Sumardjo, S., Satria, A., & Fatchiya, A. (2020). Proses dan pendekatan regenerasi petani melalui multistrategi di Indonesia. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian*, 39(2), 73-85.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka 2025*. Banjarbaru
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan. (2023). *STATISTIK MIGRASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN HASIL LONG FORM SENSUS PENDUDUK 2020*. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan.
- Beine, M., Docquier, F., & Rapoport, H. (2008). Brain drain and human capital formation in developing countries: winners and losers. *The Economic Journal*, 118(528), 631-652.
- Clemens, M. A. (2014). *Does development reduce migration?* (pp. 152-185). Edward Elgar Publishing.
- Dovlo, D. (2005). Wastage in the health workforce: some perspectives from African countries. *Human Resources for Health*, 3, 1-9.
- Gould, E. D., Lavy, V., & Paserman, M. D. (2004). Immigrating to opportunity: Estimating the effect of school quality using a natural experiment on Ethiopians in Israel. *The Quarterly Journal of Economics*, 119(2), 489-526.
- Hanggraeni, D. (2012). *Manajemen sumber daya manusia*. Universitas Indonesia Publishing.
- Murjani, A., Abdurrahman, A., Cendekia, D.G., Setyawati, A.W., Rosyada, W., Ilmi, Y., Rifani, A., Pemungkas, N.P. and Ramadhan, M.F.R. (2023). *Analisis Tematik Kependudukan Provinsi Kalimantan Selatan (Usia Perkawinan Muda dan Fertilitas, Lansia dan Masalah Kesehatan/Disabilitas, Pekerja Migran dan Risen dan Pembangunan)*. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan.
- Roosmalawati, Rusman. (1991). *Socio-Cultural and Demographic Factors Affecting Child Survival in D.I. Yogyakarta (DIY) and Nusa Tenggara Barat (NTB) – Indonesia*. A thesis Degree of Doctor of Philosophy in the Australian National University
- UNDP. (1990). *Human Development Report 1990* (Vol. 184, Issues 7-8). <https://doi.org/10.21003/EA.V184-03>



SENSUS
EKONOMI
2026

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Jl. Soekarno Hatta (Jalur Trikora) No. 7 Banjarbaru 70173

Telp.: (0511) 6749001 Fax : (0511) 6749106

Homepage: <http://kalsel.bps.go.id>

email: bps6300@bps.go.id